

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMSYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat Sub Kegiatan : Pembinaan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Tujuan : Terwujudnya kesetaraan gender dalam pelaksanaan	Pembinaan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan melalui sosialisasi peningkatan kapasitas, bimbingan teknis (bimtek), dan penguatan pengurus oleh Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Dharmasraya. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan sosial, mengawal pembangunan nagari, dan memberdayakan masyarakat Sasaran anggota untuk peningkatan kapasitas, bimbingan teknis (bimtek) LPM adalah 156 dengan rincian ketua, sekretaris dan bendahara LPM setiap nagari.	Akses : Akses gender Perempuan untuk dapat berperan dalam LPM nagari masih kurang. Partisipasi : Partisipasi gender Perempuan dalam LPM nagari masih kurang. Kontrol : Permenadagri No 18 Tahun 2018 Manfaat : dengan adanya kesetaraan gender dan peningkatan peran Perempuan dalam kepemimpinan LPM Nagari, maka akan bertambah sudut pandang dari segi perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih beragam dan menjangkau segala kebutuhan masyarakat.	Masyarakat Belum memahami isu kesetaraan gender dalam pelaksanaan kepemimpinan LPM yang masih didominasi patriarki.	Dogma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan tidak sebaiknya banyak ikut campur dalam kepemimpinan organisasi dan lebih fokus pada urusan domestik rumah tangga saja.	Terwujudnya kesetaraan gender dalam pelaksanaan kepemimpinan LPM Nagari.	Pembinaan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Dharmasraya	Pelaksanaan Pembinaan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Dharmasraya	Input : Rp. 72.264.500 Output : Pembinaan pada kepemimpinan LPM Nagari Out Come : Terlaksananya pembinaan kepemimpinan LPM Nagari melalui bimbingan teknis yang bekerja sama dengan dinas Terkait dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya.

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM : ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat Kegiatan : fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa Sub Kegiatan : peningkatan kapasitas pegawai administrasi pemerintah nagari Tujuan : terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Program Pembangunan Desa. b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Aturan ini menempatkan kepala desa (dan sebutan lainnya seperti wali nagari) sebagai aktor utama yang wajib memastikan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, setara, dan adil bagi seluruh warga tanpa memandang jenis kelamin	Akses : a. Kesetaraan Perempuan dalam pemerintahan nagari umumnya masih kurang. b. Peran aparat nagari perempuan dalam perencanaan Pembangunan di nagari sebagai pihak yang belum terpenuhi. Partisipasi : Partisipasi aparat nagari Perempuan dalam musrenbang nagari masih kurang dan belum mewakili dari gender. Kontrol : a. Pembinaan aparat nagari belum maksimal. b. Yang berwenang dalam mengambil Keputusan masih didominasi gender laki-laki. Manfaat : dengan adanya kesetaraan gender dan peningkatan peran Perempuan, maka akan bertambah sudut pandang dari segi perempuan dalam	a. Belum memahami kesetaraan gender. b. Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nagari belum mengakomodir isu kesetaraan gender.	a. Terbatasnya isu-isu gender yang muncul saat tahapan perencanaan pembangunan (musrenbang) usulan masyarakat lebih dominan pada infrastruktur. b. Minimnya pelaksanaan sosialisasi kepada kelompok perempuan dalam pelaksanaan musrenbang nagari. c. Masih minimnya informasi/pengetahuan yang dimiliki oleh aparat nagari terkait kesetaraan gender di bidang pemerintahan.	Terwujudnya pembinaan aparat nagari yang handal dan kompeten	Melakukan bimbingan teknis terhadap aparat nagari	Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap seluruh aparat/perangkat nagari	Input : Rp. 178.274.250 Output : Pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari Outcome : Terlaksananya pembinaan aparat nagari melalui bimbingan teknis yang bekerja sama dengan Balai Pelatihan Terkait dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
		pemerintahan nagari, yang berdampak domino terhadap pengambilan keputusan yang lebih beragam dan menjangkau segala kebutuhan masyarakat						

Pulau Punjung, 12 Juni 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



ASRIL, AP., M.Si.
NIP. 19750225 199501 1 001

Tim Verifikasi

 Inspektur Rahmawati, S.Pd, M.Pd NIP. 19770430 200012 1 001	 Kepala BKKD Marleni Yuni, S.Pd, M.Eng NIP. 19740824 200212 4 001	 Kepala Bappeda Erinaldi, S.T., M.Sc NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOSP3APKB MARTIN EFFENDI, S.Hut, M.M NIP. 19790905 200801 1 011
--	--	--	---

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMSYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pemberdayaan Lembaga kemsyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemsyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat Sub Kegiatan : Pembinaan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Tujuan : Terwujudnya kesetaraan gender dalam pelaksanaan	Pembinaan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan melalui sosialisasi peningkatan kapasitas, bimbingan teknis (bimtek), dan penguatan pengurus oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan sosial, mengawal pembangunan nagari, dan memberdayakan masyarakat Sasaran anggota untuk peningkatan kapasitas, bimbingan teknis (bimtek) LPM adalah 156 dengan rincian ketua, sekretaris dan bendahara LPM setiap nagari.	Akses : Akses gender Perempuan untuk dapat berperan dalam LPM nagari masih kurang. Partisipasi : Partisipasi gender Perempuan dalam LPM nagari masih kurang. Kontrol : Permendagri No 18 Tahun 2018 Manfaat : dengan adanya kesetaraan gender dan peningkatan peran Perempuan dalam kepengurusan LPM Nagari, maka akan bertambah sudut pandang dari segi perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih beragam dan menjangkau segala kebutuhan masyarakat.	Masyarakat Belum memahami isu kesetaraan gender dalam pelaksanaan kepengurusan LPM yang masih didominasi patriarki.	Dogma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan tidak sebaiknya banyak ikut campur dalam kepengurusan organisasi dan lebih fokus pada urusan domestik rumah tangga saja.	Terwujudnya kesetaraan gender dalam pelaksanaan kepengurusan LPM Nagari.	Pembinaan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Dharmasraya	Pelaksanaan Pembinaan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Dharmasraya	Input : Rp. 72.264.500 Output : Pembinaan pada kepengurusan LPM Nagari Out Come : Terlaksananya pembinaan kepengurusan LPM Nagari melalui bimbingan teknis yang bekerja sama dengan dinas Terkait dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
kepengurusan LPM Nagari.								

Pulau Punjung, 12 Juni 2026

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**



ASRIL, AP., M.St.
NIP. 19750225 199501 1 001

Tim Verifikasi

 Inspektur <u>Rahmadani S.H., M.H.</u> NIP. 19760730 200012 1 001	 Kepala BKD <u>Martien Yunus, S.Kom., M.Eng.</u> NIP. 19740823 200712 1 001	 Kepala Bapperida <u>Prinaldi S.T., M.Sc.</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINAS P3APPKB <u>MARTINEFENDI, S. Hut., M.M.</u> NIP. 19790905 200801 1 018
---	---	--	---

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN : 2027

ANGGARAN

PROGRAM	Administrasi Pemerintahan Desa		
KODE PROGRAM	2.13.04		
KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas Pegawai Administrasi Pemerintahan Nagari		
HASIL/ OUTPUT	Meningkatnya Kapasitas Pegawai Administrasi Pemerintahan Nagari		
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Program Pembangunan Desa. - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Aturan ini menempatkan kepala desa (dan sebutan lainnya seperti wali nagari) sebagai aktor utama yang wajib memastikan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, setara, dan adil bagi seluruh warga tanpa memandang jenis kelamin a. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses : - Kesetaraan Perempuan dalam pemerintahan nagari umumnya masih kurang. - Peran aparatur nagari perempuan dalam perencanaan Pembangunan di nagari sebagai pihak yang belum terpenuhi. Partisipasi : Partisipasi aparatur nagari Perempuan dalam musrenbang bagari masih kurang dan belum mewakili dari gender. Kontrol : - Pembinaan aparatur nagari belum maksimal. - Yang berwenang dalam mengambil Keputusan masih didominasi gender laki-laki. Manfaat : dengan adanya kesetaraan gender dan peningkatan peran Perempuan, maka akan bertambah sudut pandang dari segi perempuan dalam pemerintahan nagari, yang berdampak domino terhadap pengambilan keputusan yang lebih beragam dan menjangkau segala kebutuhan masyarakat. b. Penyebab Internal - Belum memahami kesetaraan gender. - Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nagari belum mengakomodir isu kesetaraan gender. c. Penyebab Eksternal - Terbatasnya isu-isu gender yang muncul saat tahapan perencanaan pembangunan (musrenbang) usulan masyarakat lebih dominan pada infrastruktur. - Minimnya pelaksanaan sosialisasi kepada kelompok perempuan dalam pelaksanaan musrenbang nagari. - Masih minimnya informasi/pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur nagari terkait kesetaraan gender di bidang pemerintahan.		
		Tujuan	Terwujudnya kesetaraan gender dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan nagari.
		Alokasi Anggaran	Rp. 178.274.250

Capaian Program	Out put Pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari Out come Terlaksananya pembinaan aparatur nagari melalui bimbingan teknis yang bekerja sama dengan Balai Pelatihan Terkait dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya.
------------------------	--

Pulau Punjung, 8 Juni 2026

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**



ASRI, A.P., M.Si.
NIP-19750225 199501 1 001

Tim Verifikasi

 Inspktor Rahmadani, S.H., M.H. NIP 19760830 200012 1 001	 Kepala BKD Martin Yonus, S.Hon., M.Eng. NIP 19740821 200212 1 001	 Kepala Bapocrida Frinaldi, S.T., M.Sc. NIP 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOSP3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP 19790905 200801 1 018
--	---	--	--

FORM KAK/ TOR

Program		Administrasi Pemerintahan Desa
Sasaran Program		Torlaksananya administrasi pemorintahan desa yang baik dan menghasilkan aparatur nagari yang handal dan kompeten.
Kegiatan		Peningkatan Kapasitas Pegawai Administrasi Pemerintahan Nagari
Sub Kegiatan		Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
Latar Belakang	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Program Pembangunan Desa. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. c. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kabupaten Dharmasraya Sebagaiman Telah diuiah Dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2020.
	Gambaran Umum	Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan nagari keikutsertaan dan peran gender Perempuan masih kurang dan perlu untuk ditingkatkan guna memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam proses pengambilan Keputusan.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pembinaan dan bimbingan teknis aparatur nagari melalui bimbingan teknis.
	Indikator Kinerja	Pembinaan dan bimbingan teknis aparatur nagari berjalan dengan dengan baik serta dapat meningkatkan peran serta aparatur nagari gender perempuan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan nagari.
	Batasan Kegiatan	Pembinaan dan bimbingan teknis.
Maksud dan Tujuan		Terwujudnya kesetaraan gender dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan nagari.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		pembinaan aparatur nagari melalui bimbingan teknis yang bekerja sama dengan Balai Pelatihan terkait dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya..
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya.
Jadwal		Januari – September 2027
Biaya		-

Pulau Punjung, 8 Juni 2026

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**



ASRIL, AP., M.Si.
NIP. 19750225 199501 1 001

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN : 2027

ANGGARAN

PROGRAM	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat		
KODE PROGRAM	2.13.05		
KEGIATAN	Peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat.		
HASIL/ OUTPUT	Terlaksannya pembinaan anggota LPM di kabupaten dharmasraya.		
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Pembinaan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan melalui sosialisasi peningkatan kapasitas, bimbingan teknis (bimtek), dan pengukuhan pengurus oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan sosial, mengawal pembangunan nagari, dan memberdayakan masyarakat Sasaran anggota untuk peningkatan kapasitas, bimbingan teknis (bimtek) LPM adalah 156 dengan rincian ketua, sekretaris dan bendahara LPM setiap nagari. a. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses : Akses gender Perempuan untuk dapat berperan dalam LPM nagari masih kurang. Partisipasi : Partisipasi gender Perempuan dalam LPM nagari masih kurang. Kontrol : Permendagri No 18 Tahun 2018 Manfaat : dengan adanya kesetaraan gender dan peningkatan peran Perempuan dalam kepengurusan LPM Nagari, maka akan bertambah sudut pandang dari segi perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih beragam dan menjangkau segala kebutuhan masyarakat. b. Penyebab Internal 1. Masyarakat Belum memahami isu kesetaraan gender dalam pelaksanaan kepengurusan LPM yang masih didominasi patriaki. c. Penyebab Eksternal 1. Dogma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan tidak sebaiknya banyak ikut campur dalam kepengurusan organisasi dan lebih fokus pada urusan domestik rumah tangga saja.		
	Tujuan	Terwujudnya kesetaraan gender dalam pelaksanaan kepengurusan LPM Nagari.	
	Alokasi Anggaran	Rp. 72.264.500	
	Total Anggaran	Rp. 72.264.500	
Capaian Program	Out put Pembinaan pada kepengurusan LPM Nagari Out come		

Pulau Punjung, 8 Juni 2026

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**



ASRI, AP., M.Si.
NIP. 19750225 199501 1 001

Tim Verifikasi

 Inspektur Rahmadani, S.H., M.H. NIP. 19760830 200012 1 001	 Kepala BKK Marlen Yungs, S.Kom., M.Eng. NIP. 19740821 200212 1 001	 Kepala Bapperida Frinaldi, S.T., M.Sc. NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINASOSP3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	--	--

FORM KAK/ TOR

Program		Pemberdayaan Lembaga komsyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
Sasaran Program		Peningkatan kelikutsertaan gender Perempuan dalam pengurusan LPM Nagari.
Kegiatan		Pembinaan terhadap pengurus LPM Nagari.
Sub Kegiatan		Peningkatan kapasitas kelombagaan Lembaga komsyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, Karang taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat.
Latar Belakang	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Mengamanatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan harus berpihak kepada kepentingan kelompok marginal, termasuk perempuan. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa: Menetapkan LPM sebagai wadah partisipasi masyarakat yang bersifat inklusif. Aturan ini mewajibkan pelibatan seluruh unsur masyarakat, termasuk kaum perempuan, dalam menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
	Gambaran Umum	Dalam pelaksanaan pengurusan LPM Nagari terbuka kesempatan bagi berbagai kelompok marginal, termasuk perempuan.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pembinaan dan bimbingan teknis pengurusan LPM Nagari.
	Indikator Kinerja	Pembinaan dan bimbingan teknis pengurus LPM Nagari berjalan dengan baik serta dapat meningkatkan peran serta pengurus gender perempuan LPM Nagari.
	Batasan Kegiatan	Pembinaan dan bimbingan teknis.
Maksud dan Tujuan		Terwujudnya kesetaraan gender dalam pelaksanaan pengurusan LPM Nagari.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		pembinaan pengurusan LPM Nagari melalui bimbingan teknis yang bekerja sama dengan Balai Pelatihan terkait dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya..
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya.
Jadwal		Januari – September 2027
Biaya		Rp. 72.264.500

Pulau Punjung, 8 Juni 2026

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**



ASRIL, P., M.Si.
NIP. 19750125 199501 1 001